



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Lembaga Keuangan Mikro/Non Bank

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan, dibandingkan dengan aset non keuangan. Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain, simpanan, kredit, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.<sup>15</sup>

Dengan kata lain lembaga keuangan adalah sebagai semua badan yang kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>16</sup>

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini peran bank dan lembaga bukan bank, begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bank tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik maka memungkinkan terjadi

<sup>15</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), h.4

<sup>16</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepanikan. Oleh karena peran mereka telah dianggap sangat sistematis dan urgen.<sup>17</sup>

Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan aset, dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus kepada unit defisit.
2. Transaksi, bank dan lembaga bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.
3. Likuiditas, yaitu unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.
4. Efisiensi, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.<sup>18</sup>

Lembaga Keuangan Mikro/Non Bank menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat melalui surat berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain.

Sedangkan penyaluran dana lembaga keuangan non bank adalah:

1. Untuk tujuan investasi.
2. Diberikan kepada badan usaha.

<sup>17</sup>Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.6

<sup>18</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Untuk jangka waktu menengah dan panjang.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank juga untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan investasi. Hal yang sama dapat dilihat pada pihak yang menerima penyaluran dana. Penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank dalam kenyataannya juga tidak hanya kepada badan usaha saja, melainkan juga kepada individu. Penyaluran tersebut juga tidak hanya untuk jangka menengah dan panjang saja, tetapi juga untuk jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyedia layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa (penata rambut, penarik becak),

<sup>19</sup>Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.5

<sup>20</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tukang dan produsen kecil. Kelompok pekerja ini sering disebut sebagai usaha mikro dan kecil (UKM).<sup>21</sup>

Definisi yang lain menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro sebagai penyedia jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro lainnya.<sup>22</sup> Peran lembaga keuangan mikro sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

## **B. Sejarah Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro/Non Bank**

Sejarah mencatat bahwa asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan. Artinya kebutuhan lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan publik telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.

<sup>21</sup>Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.8

<sup>22</sup>*Ibid*, h.24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan definisi yang lain, bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Dan bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>23</sup>

Perkembangan LKM di Indonesia dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu, diawali dengan pendirian Bank Priyai Purwokerto oleh Raden Aria Wirjaatmadja pada bulan Desember 1895. Bank ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah di Purwokerto, Jawa Tengah. Modal awal dikumpulkan dari orang-orang pribumi dan Eropa di Purwokerto oleh pejabat pemerintah Belanda. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk membebaskan pegawai pemerintah daerah (pribumi Indonesia) dari cengkeraman para rentenir, dan untuk memelihara semangat persaudaraan dan solidaritas di antara penduduk perkotaan. Bank tersebut memberikan pinjaman pada anggota-anggotanya dan memobilisasi dana melalui simpanan dan iuran anggota.<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Irham Fahmi, *Ibid*, h.2

<sup>24</sup>Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi, 2008),h.72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhir abad ke 19, pemerintah Belanda membentuk bank desa dan lumbung desa di Jawa dan Madura dengan maksud untuk membebaskan para petani kecil dari cengkeraman rentenir dan untuk menjamin agar penduduk desa memiliki cadangan beras hingga musim panen berikutnya. Bank-bank tersebut dimiliki dan dikelola oleh desa. Pada Tahun 1929, Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi mengakui keberadaan mereka melalui undang-undang lembaga perkreditan desa, yang dikenal dengan Badan Kredit Desa (BKD). Perkembangan lembaga tersebut mencapai puncaknya ketika dibentuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 19 Pebruari 1934. BRI banyak berkonsultasi dengan lembaga keuangan yakni dalam merancang pinjaman KUPEDES dan produk simpanan SIMPEDES. Sukses LKM di dunia sebagai acuan atau eksperimen bagi BRI dalam mengembangkan produk dan usahanya.<sup>25</sup>

Perkembangan LKM pada zaman kemerdekaan, yang dimulai dari zaman orde lama, orde baru, dan era reformasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik dalam memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Pada zaman Soeharto lahir Bank Pembangunan Daerah (BPD), kemudian juga didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). BRI dijadikan lembaga yang mendistribusikan kredit bersubsidi untuk produk beras, dan KUD (koperasi Unit Desa).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Indonesia telah memiliki tradisi panjang mengenai LKM. Tradisi tersebut telah dikembangkan sejak zaman

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h.73

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjajahan dan menjadi lebih hidup selama pemerintahan Soeharto. Pengembangan LKM terutama ditujukan untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah, baik di daerah pedesaan dan perkotaan, untuk memperoleh akses terhadap kredit yang lebih baik dari lembaga-lembaga keuangan. Akses ini akan membantu orang-orang berpenghasilan rendah untuk mengembangkan kewirausahaan mereka dan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang, terutama untuk wirausahawan skala kecil dan untuk membesarkan orang-orang miskin dari cengkraman para rentenir.

### C. Pengawasan

Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam artian melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa hasil dari suatu pengawasan harus sesuai berdasar kenyataan yang terjadi dari apa yang telah diawasi.

Pengawasan memiliki independensi dalam melakukan Pengawasan dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar Pengawasan yang berlaku umum. Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkan memiliki manfaat yang optimal bagi terselenggara dan terjaminnya kepentingan bank, non bank, dan masyarakat.

Untuk mencapai independensi dari fungsi Pengawasan diperlukan adanya beberapa faktor pendukung, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dukungan dari manajemen agar fungsi Pengawasan dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan pihak lain.
2. Kebebasan fungsi Pengawasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan Pengawasan yang dilakukannya.
3. Sikap mental yang independen, yang tercermin dari laporan yang lengkap, cermat dan tidak memihak.
4. Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek kegiatan yang diperiksanya.<sup>26</sup>

Fungsi Pengawasan harus memiliki beberapa elemen, yaitu sebagai berikut:

1. Independen dan objektif.
2. Melakukan aktivitas dengan perlindungan dan konsultasi dengan pihak terkait.
3. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi.
4. Memiliki pendekatan yang sistematis dan terarah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola.<sup>27</sup>

Pengawasanor harus memiliki sikap mental yang baik dan tercermin dari hal-hal berikut ini:

- a. Kejujuran, Pengawasanor harus mampu mengemukakan pendapat secara jujur dan bijaksana, sesuai dengan hasil temuannya.

<sup>26</sup>Ikatan Bankir Indonesia dan Ikatan Pengawasanor Intern Bank, *Memahami Pengawasan Intern Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.442

<sup>27</sup>*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objektivitas, Pengawasan harus selalu mempertahankan sikap objektif, sehingga dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, laporan atas hasil temuan harus lengkap dan didasarkan pada analisis yang objektif.
- c. Ketekunan, Pengawasan harus memiliki ketekunan dan keuletan di dalam menelusuri masalah/indikasi yang dihadapi guna memperoleh bukti-bukti yang akan mendukung temuannya.
- d. Loyalitas, Pengawasan harus menunjukkan loyalitas kepada tanggung jawab profesinya.<sup>28</sup>

Pengawasan harus memiliki kode etik profesi, yang merupakan prinsip-prinsip dan ekspektasi minimal mengenai cara bertindak dan berperilaku dari individu dan organisasi dalam melakukan Pengawasan, yaitu:

- a. Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggungjawab.
- b. Memiliki dedikasi tinggi.
- c. Tidak akan menerima apapun yang akan dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya.
- d. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.<sup>29</sup>

Hal-hal tersebut di atas merupakan persyaratan yang harus dimiliki OJK dalam melakukan Pengawasan, pengawasan, dan investigasi terhadap lembaga keuangan bank dan non bank, dalam rangka melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid*, h.444

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## D. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan untuk menggantikan peran Bapepam untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.<sup>30</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan.

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan otoritas jasa keuangan, yaitu

---

<sup>30</sup>Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan industri sektor jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia merupakan respons dari krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.<sup>31</sup>

Krisis pada Tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.

Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bundesbank (bank sentral

<sup>31</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, ( Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pada bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.<sup>32</sup>

Aspek pembentukan OJK, di antaranya adalah:

1. Aspek pembagian tugas.
2. Aspek koordinasi dan sinkronisasi.
3. Aspek pertanggungjawaban.
4. Aspek sumber daya manusia (SDM).
5. Aspek teknologi informasi.
6. Aspek anggaran /keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>33</sup>

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk bank, dan aktivitas dalam bidang jasa.

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non bank adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan terhadap pengelola jasa keuangan.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>34</sup>

Dalam aktivitas kegiatannya, OJK dapat melakukan pungutan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jasa keuangan. Penjelasan ini dapat dilihat pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK.
3. Pungutan tersebut adalah penerimaan OJK.
4. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri.
5. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
6. Ketentuan mengenai pungutan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.16